



PENGARUH FAKTOR PILIHAN RASIONAL TERHADAP TINGGINYA JUMLAH VOTERS ABSTENTION DI KOTA MEDAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 2018

Christian Deswinta Bangun¹, Riaty Raffiudin²

¹ Program Studi Magister Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia

deswintachristian@gmail.com

² Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia

Received: 23 Juni 2022; Revised: 10 Oktober 2022; Accepted: 1 November 2022; Published: November 2022; Available online: November 2022.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari Anthony Downs (1985) yang memandang perilaku pemilih yang melihat utilitas dari kandidat pemilu. Utilitas yang dilihat oleh pemilih, dijelaskan lebih lanjut oleh Kiewiet (1985) dan Fiorina (1982), berasal dari kinerja ekonomi dari pemerintah yang sedang menjabat. Riker dan Ordeshook (1968) menyatakan bahwa pemilih memiliki kewajiban berwarganegara dimiliki oleh setiap orang sebagai kapabilitas politiknya. Blais (2000) dan Moon (1992) menyatakan Rasionalitas pemilih juga muncul dari biaya yang dikalkulasi pemilih berdasarkan teknis kepemiluan. Penelitian ini menggunakan kasus kota Medan yang partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak Gubernurnya rendah. Permasalahan yang terjadi di Kota Medan adalah kondisi ekonomi yang cenderung negatif dibanding kota/kabuapten lain di Provinsi Sumatera Utara. Kasus Korupsi pejabat di kota Medan memberikan kesempatan bagi penelitian ini untuk menguji perasaan kewajiban warganegara pemilih. Terdapat biaya yang dikalkulasi oleh pemilih seperti keterjangkauan dan pengetahuan pemilih soal TPS yang sangat rendah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang diambil merupakan pemilih yang tidak hadir ke TPS, sejumlah 204 dengan Margin of Error sebesar 7 persen. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor evaluasi ekonomi politik berpengaruh signifikan terhadap tingginya voters abstention di Kota Medan Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. Penilaian signifikan pemilih mengacu pada “kesenjangan yang masih terjadi di antara yang kaya dan miskin” dan “kondisi perekonomian Sumatera Utara 2013-2018”. Faktor efikasi politik dan biaya pemilih tidak menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingginya jumlah voters abstention di Kota Medan. Implikasi teoritis pada penelitian ini adalah menjelaskan

rendahnya partisipasi memilih berdasarkan pendekatan pilihan rasional. Teori retrospective voting Fiorina (1982) mengarahkan pemilih pada penilaian kinerja petahana sebagai pertimbangan untuk memilih kandidat petahana sebagai hadiah dan memilih lawannya sebagai hukuman. Penelitian ini juga mampu mengarahkan asumsi hukuman tersebut dengan wujud tidak memilih. Petahana yang tidak mencalonkan diri pada Pilgub 2018 membuat pemilih menjadikan kinerja ekonomi pemerintah sebelumnya sebagai pertimbangan untuk tidak memilih.

Kata Kunci: *voters abstention, retrospective voting, pilihan rasional.*

PENDAHULUAN

Partisipasi Politik merupakan hal yang terkait dengan peranan individu dalam suatu dinamika politik yang berlangsung di negaranya. Huntington (1977) menekankan hal yang sama mengenai partisipasi politik secara umum yaitu berpartisipasi dalam memilih¹ Tingginya angka *abstain* juga menjadi tantangan bagi kajian perilaku memilih. Pada pemilihan umum kasus Indonesia jika persentase partisipasi memilih di era reformasi, persentase tidak memilih juga tetap meningkat dari 10,21% di 1999, 2004 dengan 23,34%, 2009 dengan 29,4 % persen, ke 30 persen di Pemilu 2014.² Tidak hanya di ranah nasional saja, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berperan sebagai perwujudan partisipasi politik rakyat daerah melalui UU No. 32

Tahun 2002, menambah panjang rendahnya partisipasi politik daerah. Dalam dua periode awal penyelenggaraan Pilkada Serentak, partisipasi pilkada serentak tahun 2015 mencapai 64,02 persen dan tahun 2017 mencapai 71,58 persen. Artinya, rata-rata partisipasi memilih pilkada serentak tidak ada yang mencapai angka 80%.³

Untuk menganalisa fenomena *voters abstention*, penelitian ini menggunakan pendekatan perilaku memilih rasional yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini. Perilaku memilih rasional menurut Downs (1957) memusatkan perhatiannya pada respon individu terhadap kandidat yang akan dipilihnya, sehingga peluang pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya juga menjadi pertimbangan.

¹ Samuel Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (terj.), (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 9-10.

² Databoks, *Angka Golput Tinggi Sejak Dilakukan pemilihan Presiden secara langsung*, diakses dari [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/28/angka-golput-tinggi-sejak-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/28/angka-golput-tinggi-sejak-dilakukan-pemilihan-presiden-secara-langsung)

[dilakukan-pemilihan-presiden-secara-langsung](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/28/angka-golput-tinggi-sejak-dilakukan-pemilihan-presiden-secara-langsung), pada pukul 09.11

³ Robertus Wardi, *Target Partisipasi Memilih Dinilai Realistis*, diakses dari <https://www.beritasatu.com/politik/700937/target-partisipasi-pemilih-dinilai-realistis>, pada tanggal 1 Agustus 2021, pukul 18.25.

Pemilih digambarkan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu memilih kandidat berdasarkan manfaat yang diperoleh dari kandidat yang berkuasa. Informasi mengenai kandidat menjadi barang penting bagi pemilih untuk mengkalkulasi manfaat yang diperoleh pemilih dari kandidat. Jika tidak ada manfaat yang diperoleh pemilih dari kandidat, maka pemilih cenderung untuk abstain. Hal ini sudah dibuktikan oleh studi Pappi (1990) yang dikutip dalam Roth (2008), bahwa pemilih cenderung berpihak pada partai kecil sebagai wujud protes, sehingga partai besar merubah tawaran kebijakannya.⁴ Meskipun begitu, kajian Downs (1957) hanya terbatas pada kalkulasi keuntungan terhadap kandidat semata. Kalkulasi terhadap kandidat, menurut Adams dkk (2006) memiliki kelemahan dalam mengkaji penyebab *voters abstention*. Ketidaktertarikan terhadap kandidat dan kandidat yang memaksakan kehendak cenderung membuat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Menurut Riker dan Ordeshook (1968), perilaku memilih rasional tidak bisa dilepaskan dari rasa

kewajiban berwarganegara yang ditandai dengan kebanggaan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sebagai tanda telah melaksanakan kegiatan kewarganegaraan. Pernyataan ini juga didukung oleh Norris (1999) bahwa negara yang demokratis didukung oleh pemilih yang menggunakan hak pilihnya.⁵ Meskipun begitu, menurut Mujani, Liddle, Ambardi (2011), rasa kewajiban berwarganegara cenderung membuat kegiatan penggunaan hak pilih menjadi tidak rasional. Pemilih yang kurang memiliki akses informasi cenderung menggunakan hak pilihnya dibanding orang yang memiliki informasi yang memadai. Pemilihan teori perilaku rasional dalam mengkaji perilaku tidak memilih dalam penelitian ini didasarkan pada problematika yang terdapat pada perilaku memilih sosiologis dan psikologis. Perilaku memilih sosiologis yang masih belum mampu menjelaskan dinamika politik dalam pemilihan karena faktornya yang relatif stabil. Karena tidak adanya perubahan yang signifikan dari sisi demografi khususnya di Indonesia. Perilaku memilih

⁴ Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, teori-teori, Instrumen, dan Metode*, (Jakarta: FSNT), hal. 49.

⁵ Saiful Mujani, William Liddle, Kuskridho Ambardi, *Kaum Demokrat Kritis*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 173

psikologis masih terbatas pada kekuatan identitas partai politik. Rotasi kekuasaan yang terjadi di dalam partai politik belum mampu membuat pemilih menyesuaikan pilihannya dengan kandidat yang diusung oleh partai politik tempatnya bernaung. Hal ini dikarenakan perilaku memilih psikologis juga menunjukkan bahwa tawaran program kandidat membuat pemilih menjatuhkan pilihannya pada kandidat yang tidak sesuai dengan identitas partainya. Menurut Mujani (2011), perilaku memilih rasional mampu untuk menjelaskan pemilih yang tidak memilih karena biaya pemilih memicu pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Kelemahannya adalah kewajiban berwarganegara dianggap mengaburkan pemahaman perilaku memilih rasional, sehingga patut diuji kembali lebih lanjut pada penelitian ini⁶

Untuk menguji penyebab tingginya angka *abstain* dalam pemilihan umum melalui perilaku memilih rasional, maka peneliti mencoba mengambil kasus di Kota Medan dalam Pilkada Serentak 2018. Pengambilan lokasi penelitian di Kota Medan mengacu pada data yang dibandingkan

dengan daerah-daerah lain yang memiliki partisipasi memilih yang rendah pada Pilkada Serentak 2018. Jika Mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilihan tingkat Provinsi 2018, Sumatera Utara termasuk dalam tiga besar dengan provinsi yang terendah partisipasi memilihnya bersama dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Sumatera Utara unggul dengan 61,78 persen dibanding Riau dengan 58,02 persen dan Kalimantan Timur yang hanya mencapai 58,16 persen. Jika dilihat dari Kota yang menyumbang jumlah pemilih terbesar pada Pilkada Serentak 2018, Kota Medan merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah pemilih terbesar dengan 1.641.648 pemilih. Kota-Kota lain seperti Kota Pekanbaru dengan 497.880 pemilih, Kota Palembang dengan 1.168.254, Kota Surabaya dengan 2.037.113 dan Kota Denpasar dengan 415.536 pemilih berada dibawah Kota Medan. Tetapi partisipasi memilih di Kota Medan dalam Pilgub Sumut hanya sebesar (55,7 persen) berada dibawah Surabaya (57,3 persen) Denpasar (68,1 persen) Palembang

⁶ Saiful Mujani, William Liddle, Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat*, (Bandung: Mizan), hlm. 309.

(67 persen), dan Pekanbaru (62 persen).⁷

Permasalahan mengenai rendahnya angka partisipasi memilih sudah ada sejak Pilkada diselenggarakan pertama kali di Kota Medan. Jika mengacu pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) pertama di 2008 partisipasi memilih pemilih kota Medan mencapai angka 47,10 persen. Pada Pilgub kedua di tahun 2013 mencapai 38,58 persen dan tahun 2018 dengan 55,80 persen. Partisipasi memilih pada pemilihan Walikota Medan pada tahun 2005 mencapai 54,70 persen. Pada Pilkada 2010 yang diselenggarakan dua putaran selanjutnya terus menurun dari 35,68 persen di putaran pertama dan 38,28 persen di putaran kedua. Pada Pilkada Serentak 2015, jumlah pemilih menurun dan menjadi yang terendah selama penyelenggaraan Pilkada Kota Medan dengan perolehan 25,38 persen.⁸

⁷ KPU, Penetapan Hasil Pilkada Provinsi Sumatera Utara, diakses dari https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/rekap/tl/sumatera_utara, pada tanggal 24 April 2020, pukul. 14.00.

Salah satu variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Biaya memilih, Biaya memilih, khususnya biaya untuk menggunakan hak pilih TPS menurut Blais (2000) lebih berdampak signifikan ketimbang biaya informasi pemilih sebagai pertimbangan untuk menggunakan hak pilih. Karena Biaya untuk berangkat ke TPS berkaitan dengan ongkos yang dikeluarkan oleh pemilih karena TPS yang tidak terjangkau oleh pemilih. Dalam survei Polgov (2018) juga terdapat hasil wawancara kualitatif yang menunjukkan bahwa pemilih kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya karena lokasi TPS yang tidak terjangkau oleh pemilih. Ini merupakan upaya dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sendiri dalam menggabungkan TPS agar mengurangi daya tampung TPS yang terlalu besar sesuai dengan PKPU nomor 8 Tahun 2018 pasal 10.⁹

⁸ KPU Kota Medan, *Menakar Kadar Partisipasi Pemilih di Kota Medan Menyongsong Pilkada Serentak 2020*, diakses dari <https://kpud-medankota.go.id/menakar-kadar-partisipasi-pemilih-di-kota-medan-menyongsong-pilkada-serentak-2020/>, pada tanggal 24 April, Pukul 14.35.

⁹ Polgov, *Voters Abstention Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Ketidakhadiran Pemilih*

Permasalahan kewajiban berwarganegara untuk menggunakan hak pilih yang menurut Mujani masih sulit diuji rasionalitasnya karena hanya berkaitan dengan perasaan pribadi pemilih tanpa substansi untuk menggunakan hak pilih. Feitosa (2019) menunjukkan bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah mampu mempengaruhi perasaan kewajiban berwarganegara sekaligus mempengaruhi angka pemilih. Karena hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil negatif pada skala pemilihan nasional, tetapi dampak signifikan dari pengaruh perasaan kewajiban berwarganegara dengan kasus korupsi dan angka pemilih cenderung menguat jika ada diranah perkotaan. Berdasarkan Survei dari Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2017, Medan termasuk salah satu kota dengan angka korupsi tertinggi berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan data Medan (37,4 poin), Makassar (53,4 poin),

dan Bandung (57,9 poin).¹⁰ Kasus korupsi yang menimpa Gatot Pujo Nugroho, yang merupakan Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018, membuat rakyat cenderung semakin apatis. Bahkan pernyataan Komisioner KPUD Medan yang dikutip dalam suatu penelitian jurnal menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara maksimal, tetapi realitas politik yang menunjukkan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan menunjukkan bahwa dari pemilihnya sendirilah yang bertindak apatis.¹¹ Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kewajiban berwarganegara perlu untuk diuji.

Menurut Fiorina (1978), kondisi perekonomian menjadi pertimbangan pemilih untuk menilai kinerja pemerintah dalam proses pemungutan suara.¹² Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, pada tahun 2017 permasalahan ekonomi Sumatera Utara adalah pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan dalam

dalam Pilkada 2018 di Kota Medan. Yogyakarta: Fisipol UGM.

¹⁰ CNN, *Survei TII: Medan Kota Terkorup 2017*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171122193232-12-257460/survei-tii-medan-kota-terkorup-2017>, pada tanggal 30 November 2020, pukul 19.17.

¹¹ Ardiantin dan Julian, *Korelasi Identifikasi Apatisisme Politik dengan Kebijakan Publik Kota Medan*, Jurnal PIR. Vol 3 (1), Agustus 2018, hal. 29-52.

¹² Morris Fiorina, *Economic Retrospective Voting in America National Elections: A Micro Analysis*, American Journal of Political Science, vol. 22 (2). Hal. 426-443.

rentang waktu 3 tahun. Pada tahun 2015 persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara sebesar 5,10, sempat naik pada 2016 sebesar 5,18 dan kembali menurun pada tahun 2017, 5,12. Untuk tingkat pengangguran terbuka jika diukur pada kasus Sumatera Utara pada tahun 2017, kota Medan memperoleh 9,46 persen dan diurutkan kedua dibawah Kota Tebing Tinggi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,73 persen.¹³ Lalu tingkat Inflasi di kota Medan termasuk yang tertinggi kedua sekitar 3,18 persen dan dibawah Kabupaten Padang Sidempuan dengan perolehan 3,82 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan naik turunnya harga, tingkat pengangguran, dan PRDB masih cukup tinggi sampai pemilihan berlangsung.

Jika diperhatikan dari data-data diatas, kondisi-kondisi tersebut membentuk perilaku memilih rasional yang sesuai dengan perspektif Downs (1957), Fiorina (1981), Riker dan Ordeshook (1968), Kiewiet (1985), Blais (2000) dan Feitosa (2019). Disamping studi yang dilakukan

oleh Mujani, Liddle, Ambardi (2011) seperti yang sudah disinggung sebelumnya, terdapat aspek-aspek perilaku memilih rasional lainnya yang kompatibel dengan permasalahan tingginya angka *abstain* di Kota Medan dalam Pilgub Sumatera Utara 2018. Selain kompatibel, terdapat pula tiga variabel yang nantinya akan diuji dalam penelitian ini, seperti biaya untuk menggunakan hak pilih yang belum pernah diteliti sebelumnya, pengujian terhadap kewajiban berwarganegara di tingkat lokal, dan penelitian kinerja ekonomi pemerintahan di tingkat lokal yang belum dijelaskan di tingkat lokal dan mengisi celah-celah penelitian sebelumnya pada Pilkada Serentak.

KERANGKA TEORI

Pendekatan Pilihan Rasional

Penelitian ini akan menggunakan teori-teori yang mengembangkan premis-premis dari teori Anthony Downs (1957). Teori yang dimaksud yaitu *civic duty theory* yang dikembangkan oleh Riker dan Ordeshook (1968), *retrospective voting theory* dari Morris Fiorina (1981) dan *cost of voting theory* yang

¹³ Data diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

didasarkan pada pengembangan teori David Moon (1992) dan Andre Blais (2000). Alasan digunakannya ketiga teori ini, selain karena mampu melengkapi teori Downs (1957), adalah sesuai dengan permasalahan penelitian, seperti evaluasi terhadap kinerja ekonomi pemerintahan sebelumnya, kewajiban berwarganegara dan biaya memilih.

Secara umum kritik terhadap pandangan Downs (1957) adalah cenderung melihat pemilih secara egosentris dan tidak melihat bahwa *abstain* merupakan sikap pemilih dalam berdemokrasi. Keterbatasan lain dari premis Downs (1957), cenderung melihat partisipasi memilih pemilih baik *abstain* atau memilih hanya terbatas pada proses pemungutan suara saja

1) *Retrospective Voting Theory*

Kiewiet (1985) menjelaskan bahwa pemilih dapat menggunakan kondisi ekonomi rumah tangganya atau kondisi ekonomi negaranya untuk memilih. Pandangan Kiewiet (1985) keterbatasannya terdapat pada perekonomian nasional sebagai pertimbangan terbaik untuk menggunakan hak pilih. Karena pengukuran

terhadap perekonomian nasional lebih mampu diterapkan pada pemilihan nasional ketimbang pemilihan lokal.

Fiorina (1981) menawarkan sebuah teori yang bersifat evaluatif terhadap pemerintahan dan kandidat yang akan berkontestasi. *Retrospective voting theory* Fiorina (1981) juga berangkat dari kinerja perekonomian yang dinilai berdasarkan pengukuran ekonomi rumah tangga pemilih pada masa pemerintahan di periode jabatan tertentu. Jika ekonomi rumah tangga pemilih pada periode pemerintahan saat ini kondisinya kurang baik, maka pemilih tidak akan menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk hukuman terhadap pemerintahnya. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi rumah tangga pemilih mengalami peningkatan pada periode pemerintah sebelumnya, maka pemilih akan memilih kandidat yang sedang memerintah tersebut.¹⁴ Pemilih meyakini bahwa lebih mudah mengukur kinerja perekonomian pemerintah karena perekonomian sangat dekat dengan kehidupannya sehari-hari Francois Gelneau (2013) juga memperkuat asumsi Fiorina (1981) mengenai penilaian kinerja

¹⁴ Justin Fisher. Dkk, *The Routledge Handbook Of Elections, Voting Behavior, and Public Opinion*, (London: Routledge), hal. 192.

ekonomi pemerintahan sebelumnya kedalam tiga bagian. Pertama, pemilih harus mampu mengamati kondisi ekonomi rumah tangga ataupun kondisi perekonomian nasional. Kedua, pengamatan terhadap kondisi perekonomian harus digunakan oleh pemilih sebagai alat evaluasi. Ketiga, pemilih mampu memberikan penilaian logis mengenai pertanggung-jawaban pemerintah terhadap kinerja perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁵ Kelemahan dari teori penilaian retrospektif dalam mempengaruhi pilihan pemilih adalah keberhasilan penilaian kinerja ekonomi terhadap keterpilihan pertahana di negara-negara maju. Pada kasus negara berkembang, yang menjadi kendalanya adalah kemampuan pemilih dalam menyerap informasi ekonomi dan informasi mengenai kebijakan publik.

2) *Civic Duty Theory*

Riker dan Ordeshook (1968) memperjelas nilai demokrasi yang dimaksud oleh Downs dengan Teori Kewajiban berwarganegara

(*Civic Duty*). Downs menyatakan bahwa pemilu merupakan sebuah hadiah bagi pemilih karena mewujudkan nilai demokrasi itu sendiri.

Kewajiban berwarganegara (*Civic Duty*) dapat diartikan sebagai perwujudan sisi altruistik pemilih dalam pemilihan. Pemilih memiliki efikasi poliitk atau pemahaman yang baik terhadap kondisi politik lingkungan pemilihnya, tetapi jika tidak memiliki efikasi politik yang baik, maka pemilih akan *abstain* atau menjadi apatis.¹⁶

Berbeda dengan Riker dan Ordeshook, Robert Lane (1959) dan George Balch (1974) menjelaskan lebih lanjut bahwa efikasi politik memiliki dua dimensi yaitu dimensi efikasi politik internal dan eksternal.¹⁷ Dimensi efikasi politik internal merupakan kompetensi atau kemampuan pemilih dalam memahami situasi politik di negara atau lingkungannya, sehingga kemampuan tersebut dimanfaatkan oleh pemilih untuk berpartisipasi efektif dalam ranah politik. Efikasi politik internal

¹⁵ Francois Gellneau, Electoral Accountability In The Developing World, Electoral Studies, Vol. 32 (3), hal. 418-424.

¹⁶ William H. Riker dan Peter Ordeshook, A theory of The Calculus of Voting, American Political Science review, hal. 25-42.

¹⁷ Joshua J. Dyck and Edward L. Lascher, Direct Democracy and Political Efficacy Reconsidered, Political Behavior, Vol. 31 (3), hal. 401-427.

terdiri atas pengetahuan politik, kemampuan politik, kepercayaan diri untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Dimensi eksternal efikasi politik merupakan respon pemilih terhadap kinerja pemerintah dalam menampung aspirasi pemilih.¹⁸ Efikasi politik eksternal juga terkait dengan Keyakinan seseorang terhadap kompetensi suatu otoritas atau rezim dalam mempengaruhi warga negara. Gabriel (1986) melihat efikasi politik sebagai pengaturan suatu lembaga untuk memastikan warga negara mempengaruhi proses politik menjadi gerbang bagi pemilih untuk mengaktualisasikan kemampuan politiknya¹⁹ Efikasi politik kurang dijelaskan secara lengkap oleh Riker dan Ordeshook sebagai bagian dari kewajiban berwarganegara. Penjelasan Lane (1959) membantu memperkuat proposisi kelima mengenai efikasi politik.

3) *Cost of Voting Theory*

Moon (1999) memberi penjelasan mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilih kedalam dua aspek, yaitu Biaya dalam

menggunakan hak suara. Biaya penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara berkaitan dengan dengan teknis kepemiluan seperti pendaftaran pemilih, pengalaman sebelumnya terhadap teknis kepemiluan, ongkos pribadi, dan kendala sumber daya pemilih.²⁰ Dengan kata lain, berdasarkan pertimbangan terhadap biaya pendaftaran, pemilih mempertimbangkan masalah teknis kepemiluan seperti mengecek kembali status pemilih di kantor penyelenggara pemilu dan keterjangkauan TPS dengan tempat tinggalnya.

Blais (2000) tentu menambahkan beberapa indikator yang terkait dengan biaya pemungutan suara di TPS seperti, lama waktu pemilih untuk menggunakan hak suaranya di TPS dan kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS.²¹ Sanders (1980) juga memiliki indikator khusus yang didasarkan pada perspektif demografis. Penduduk pedesaan mengalami biaya memilih yang tinggi karena tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah.²² Lama tinggalnya pemilih dalam

¹⁸ George I. Balch, Multiple Indicators in Survey Research: The Concept Senses of Political Efficacy, *Political Methodology* (1), hal. 1-43

¹⁹ Oscar W. Gabriel, *Politische Kultur, Postmaterialismus und Materialismus in der Bundesrepublik, Jerman*: Opladen, hal 223.

²⁰ David Moon *The Determinants of Turnout in President Election An Integrative Model Accounting*

for Information, Political Behaviour, Vol 14 (2), hal. 123-140.

²¹ Blais, *To Vote Or To Not To Vote: The Merits and Limits Of Rational Choice Theory*, University Of Pittsburg Press : Pittsburg, hal. 89.

²² Lee Sigelman and Williem Barry, *Cost and the Calculus of Voting, Political Behavior*, vol. 4 (4), hal. 419-428.

suatu daerah juga berpengaruh bagi biaya pemilih, karena pemilih tersebut harus dikenal oleh konstituen kandidat itu sendiri. Disamping itu terdapat pemilih yang domisilinya tidak sesuai dengan TPS tempat pemilih tersebut menggunakan hak suara.

MODEL ANALISIS

Argumentasi peneliti didasarkan pada proses pemilihan yang berangkat dari kalkulasi pribadi individu. Pendekatan perilaku rasional Downs (1957) cenderung melihat relasi kandidat dengan pemilih, dimana pada kasus ini pemilih mempertimbangkan keuntungan yang diperolehnya ketika memilih seorang kandidat, baik petahana atau bukan. Jika pemilih tidak melihat keuntungan dari setiap kandidat, maka pemilih akan abstain. Dalam kasus kinerja petahana, Pemilih abstain hadir dari pemilih yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya. Tantangan yang dihadapi adalah tidak adanya petahana yang maju pada Pilgub Sumatera Utara 2018. Sehingga pemilih abstain di kota medan mengarah pada penilaian mereka terhadap ketidakpuasan kinerja Pemprov Sumut 2013-2018

Penulis akan menggunakan masing-masing satu proposisi dari tiga teori yang relevan untuk

menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan oleh peneliti. Berikut proposisi yang digunakan dalam penelitian ini:

Proposisi yang pertama dijelaskan adalah “kinerja ekonomi pemerintahan sebelumnya menjadi pertimbangan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya”. Proposisi ini diarahkan untuk menguji relasi kinerja pemerintahan sebelumnya sebagai pertimbangan pemilih untuk abstain. Melalui proposisi ini yang diukur adalah tingkat evaluasi pemilih terhadap kebijakan perekonomian rumah tangga daerah (Kota Medan) di masa pemerintahan Pemprov Sumatera Utara periode 2013-2018. Menurut peneliti, informasi perekonomian rumah tangga merupakan alat kalkulasi yang mudah bagi pemilih dalam mempertimbangkan penggunaan hak pilihnya, karena dekat dengan kehidupannya sehari-hari. Selain itu pemilihan perekonomian di masa pemerintahan Pemprov Sumatera Utara pada periode 2013-2018 menurut peneliti memenuhi kaidah *retrospective voting theory*. Karena secara rentang waktu, penilaian kinerja perekonomian pada periode 2013-

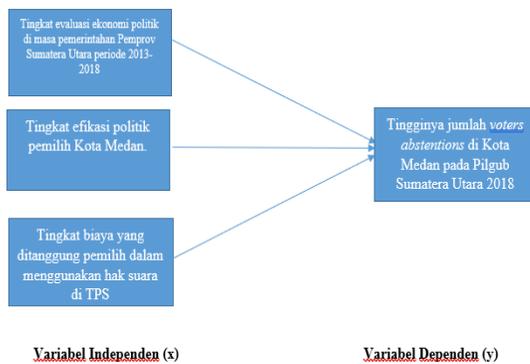
2018 ini menjelang berlangsungnya pilkada Gubernur 2018.

Proposisi kedua, pemilih memiliki efikasi politik atau pemahaman yang baik terhadap kondisi politik lingkungan pemilihnya, tetapi jika tidak memiliki efikasi politik yang baik, maka pemilih akan *abstain* atau menjadi apatis". Proposisi ini digunakan untuk menjawab perasaan kewajiban berwarganegara pemilih dan kaitannya terhadap tingginya angka abstain. Cara mengukur proposisi ini adalah dengan mengukur tingkat efikasi politik pemilih pada Pilgub Sumatera Utara 2018. Melalui pengukuran efikasi politik ini dapat diketahui sejauh mana keterlibatan pemilih dalam kegiatan pemerintah, seperti membayar pajak dan kerja bakti membuat pemilih cenderung terlibat dalam pemilihan atau tidak. Tujuan akhir dari pengukuran efikasi politik adalah mengetahui manfaat yang diperoleh pemilih dari keterlibatannya dalam politik mempengaruhi keputusannya untuk memilih atau tidak memilih.

Ketiga, pemilih mempertimbangkan biaya yang berkaitan dengan teknis memilih untuk menggunakan hak pilihnya. Proposisi ini berupaya untuk

menjawab hubungan antara biaya memilih terhadap tingginya jumlah abstain pemilih. Yang diukur dalam penelitian ini adalah tingginya biaya yang ditanggung pemilih demi menggunakan hak suara di TPS. Menurut peneliti, pemilih memerlukan biaya untuk pergi ke TPS. Keterjangkauan lokasi TPS menjadi permasalahan tersendiri bagi pemilih untuk pergi ke TPS, sehingga berakibat pada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Oleh karena itu penggunaan pendekatan perilaku memilih rasional menjadi relevan sebagai upaya untuk menjawab permasalahan penelitian. Karena dari tiga proposisi ini seperti, kinerja ekonomi pemerintahan sebelumnya, kewajiban berwarganegara, dan biaya memilih melibatkan kalkulasi individu menjadi objek analisisnya. Kalkulasi terhadap kinerja ekonomi pemerintahan sebelumnya, pengetahuan politik pemilih dan biaya yang ditanggung oleh pemilih, membuat pemilih berada pada posisi yang independen. Melalui kalkulasi tersebut pemilih mendapat gambaran untuk mempertimbangkan akan menggunakan hak pilihnya atau tidak.



Hipotesis

H1: Terdapat pengaruh tingkat evaluasi perekonomian rumah tangga daerah (Kota Medan) di masa Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018 terhadap tingginya jumlah *voters abstention* di Kota Medan pada Pilgub Sumatera Utara 2018.

H2: Terdapat pengaruh tingkat efikasi politik pemilih Kota Medan terhadap jumlah *voters abstentions* di Kota Medan pada Pilgub Sumatera Utara 2018.

H3: Terdapat pengaruh tingkat biaya yang ditanggung oleh pemilih dalam menggunakan hak suara di TPS terhadap jumlah *voters abstentions* di Kota Medan pada Pilgub Sumatera Utara 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. Metode

Kuantitatif menurut Cresswell (2014) merupakan metode yang diarahkan untuk menguji teori yang dioperasionalkan dengan cara meneliti relasi antar variabel yang dinyatakan dengan instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengambil data berupa angka dengan menggunakan rumus statistik.²³ Metode ini jika dilihat dari caranya menggali data dilakukan dengan ketat dan ada batasan-batasan tertentu untuk data apa yang diperoleh. Variabel-variabel yang diteliti tersebut menghasilkan hubungan kausal, karena didalamnya terdapat 2 jenis variabel yaitu variabel independen dan dependen. Pada proposal penelitiannya dihasilkanlah hipotesis berdasarkan relasi dua variabel independen dan dependen.

RESPONDEN PENELITIAN

Menurut Neumann (2008), populasi merupakan sehimpunan kasus dimana peneliti menjadi objek. Populasi merupakan bentuk generalisasi dari sekumpulan sampel. Sampel merupakan sebagian kecil dari keseluruhan objek penelitian.²⁴

²³ Cresswell, Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 05.

²⁴ W. Lawrence Newmann, Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Jakarta: Indeks), hal. 49.

Objek penelitian yang akan disasar pada penelitian ini adalah Pemilih di Kota Medan yang tidak memilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur yaitu 725.539 pemilih.

Penentuan Populasi menggunakan metode *slovin* didasarkan pada *margin of error* yang dikandungnya yaitu 5% dan kredibilitasnya 95 %. Hal ini sesuai dengan Yang dikatakan oleh De Vaus (2002).²⁵ Tetapi De Vaus (2002) juga menyatakan terdapat *margin of error* diatas 5 persen, seperti 6%-10%. Karena Pertimbangan kenaikan kasus COVID-19 dan PPKM saat penelitian berlangsung, peneliti menggunakan *margin of error* sebesar 7% untuk mengurangi jumlah populasi dan memenuhi kaidah metodologis seperti yang dijelaskan oleh De Vaus.

Jenis pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *multistage random sampling*. Pengambilan sampel ini bertujuan agar mewakili tingkatan sampel yang paling bawah. Selain itu *multistage random sampling* digunakan karena latar belakang sampel yang bersifat heterogen. *Sampling frame* penelitian ini yaitu 725.539 penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya

pada Pilgub Sumatera Utara 2018 jumlah dari kecamatan, kelurahan dan TPS. Kota Medan memiliki 21 Kecamatan, 151 kelurahan, dan 3024 TPS.

Dari 21 kecamatan kota Medan, akan dipilih kelurahan secara Acak sederhana. Dari pengacakan kelurahan tersebut didapatkanlah 21 kelurahan. Artinya dari satu kecamatan diambil 1 kelurahan terpilih, sehingga terpilihlah 1 kelurahan. Hal ini dikarenakan jumlah sampel yang hanya 204 sampel. Lalu proporsi sampel yang digunakan, mempertimbangkan jumlah pemilih per kecamatan. Untuk mempermudah penarikan sampel dipilihlah 1 kecamatan dalam 1 sampel, karena rata-rata 1 kecamatan terdiri dari 6-12 sampel responden.

²⁵ David De Vaus, *Surveys In Social Research*, (London: Routledge), hal. 47-50.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan Evaluasi Ekonomi politik Kota Medan pada Masa Pemrov Sumut 2013-2018 terhadap tingginya Voters Abstention di Kota Medan.

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah Terdapat pengaruh dari evaluasi kondisi ekonomi politik terhadap tingginya jumlah voters abstention di Kota Medan Pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. Hipotesis ini berangkat dari proposisi Fiorina (1974) bahwa kondisi ekonomi pemilih dan pemerintahannya menjadi hal yang terdekat bagi pemilih sebagai bahan untuk mempertimbangkan keputusannya untuk menggunakan hak pilihnya. Mujani, Liddle, dan Ambardi (2011) menyatakan bahwa turunnya persentase partisipasi politik di Indonesia merupakan dampak dari semakin rasionalnya pertimbangan pemilih dalam menentukan hak pilihnya. Dengan kata lain pemilih mengkalkulasi keuntungan yang diperoleh ketika suatu pemerintahan berjalan atau keuntungan yang diperolehnya untuk memilih kandidat yang sedang berkontestasi.

Berikut tabulasi silang antara Pemerintah Sumatera Utara mampu mengatasi kesenjangan antara yang Kaya dan Miskin,

dengan ketidakpuasan Pemprov Sumut 2013-2018

Tabel 1.1.
Tabulasi silang antara Pemprov Sumatera Utara 2013-2018 mampu mengatasi Kesenjangan Antara yang kaya dan Miskin dengan Ketidak puasan Pemilih Terhadap Kinerja Pemrov Sumatera Utara 2013-2018

Pemprov Sumatera Utara 2013-2018 mampu mengatasi Kesenjangan Antara yang kaya dan Miskin		Ketidak puasan Pemilih Terhadap Kinerja Pemrov Sumatera Utara 2013-2018		Total
		Tidak	Ya	
	Sangat Tidak Setuju	2.0%	0.0%	2.0%
	Tidak Setuju	24.0%	7.8%	31.9%
	Ragu-Ragu	26.0%	17.2%	43.1%
	Setuju	11.3%	11.3%	22.5%
	Sangat Setuju	0.5%	0.0%	0.5%
Total		63.7%	36.3%	100.0%

Terdapat respon yang berimbang antara responden yang tidak puas dan puas terhadap kinerja Pemrov Sumatera Utara 2013-2018 dengan persentase masing-masing 11,3 persen. Pemilih yang tidak puas cenderung tidak setuju dengan kemampuan Pemprov Sumut 2013-2018 mengatasi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Pemilih yang puas hanya

7,8 persen yang menjawab tidak setuju dan lebih rendah dari jumlah responden yang setuju dengan 11,3 persen. Berikut hasil uji *chi-square* terhadap indikator kemampuan Pemprov Sumut 2013-2018 dalam mengatasi kesenjangan yang kaya dan yang miskin.

Tabel 1.2.
Uji Chi-Square antara Pemprov Sumatera Utara 2013-2018 mampu mengatasi Kesenjangan Antara yang Kaya dan Miskin dengan Ketidakpuasan Pemilih Terhadap Kinerja Pemprov Sumatera Utara 2013-2018.

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.883 ^a	4	.028
Likelihood Ratio	12.628	4	.013
Linear-by-Linear Association	8.688	1	.003
N of Valid Cases	204		

Angka *chi-square* pada korelasi pernyataan kemampuan Pemprov Sumatera Utara 2013-2018 dalam mengatasi kesenjangan ekonomi memiliki signifikansi. Karena angka 0,028 dibawah angka 0,05. Kekuatan hubungan yang ditunjukkan pada pertanyaan ini adalah semakin pemilih abstain menilai pemerintah kurang

mampu dalam mengatasi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, semakin pemilih tidak puas dengan kinerja Pemprov Sumut 2013-2018. Pemilih abstain menilai secara subjektif bahwa pemerintah tidak mampu mengakomodir pihak yang miskin dan kaya agar tidak tercipta jarak diantara keduanya. Dengan kata lain pemilih abstain sebagai individu yang mencari keuntungan tidak melihat adanya peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan tersebut. Menjelang Pilkada 2013, kesenjangan ekonomi di Kota Medan meningkat 9,64 persen. Pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 9,12 persen. Tingkat kemiskinan di kota Medan meningkat pada tahun 2015 sebesar 9,41 persen. Persentase kemiskinan terus mengalami penurunan dari tahun 2016 dengan 9,30 persen sampai 8,29 persen. Secara kecenderungan, persentase tingkat kemiskinan di kota Medan terbilang stabil, bahkan mengalami penurunan di akhir periode Pemprov Sumut 2013-2018. Berdasarkan stabilnya angka kemiskinan tersebut, pemilih abstain tidak melihat adanya perubahan signifikan terhadap kesenjangan ekonomi yang ada di Kota Medan.

Kesenjangan antara pemilih yang kaya dan yang miskin mengarah kepada adanya perbedaan tingkatan sosial. Menurut Arief Budiman (1995), Pihak yang miskin memiliki kecenderungan untuk bersifat resisten terhadap pemerintah. Bentuk perlawanan yang hadir bersifat politis seperti membentuk kelompok kepentingan.²⁶ Mancur Olson (1965) menegaskan bahwa meskipun setiap kelompok kepentingan memiliki kepentingan yang sama, tetapi antara satu individu dengan individu lainnya didalam kelompok tersebut pasti mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri.²⁷ Cara pandang individualis antara pemilih abstain yang kaya atau yang miskin inilah yang melihat pemerintah gagal memberikan keuntungan bagi pemilih.

Kekuatan hubungan antara kemampuan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin dengan pemilih yang tidak puas terhadap kinerja pemprov sumut 2013-2018 mendukung hipotesis kinerja Pemprov Sumut 2013-2018 mempengaruhi tingginya jumlah

voters abstention di kota medan pada masa pemerintahan Pemprov Sumut 2013-2018. Seperti yang dinyatakan oleh Fiorina (1982), pemilih akan menilai berdasarkan kondisi yang terdekat dengan dirinya yaitu kondisi ekonominya. Kondisi ekonomi yang paling mudah dilihat oleh pemilih adalah adanya kesenjangan ekonomi diantara mereka. Walaupun penelitian ini tidak melihat secara jelas bukti antara kesenjangan yang kaya dan yang miskin melalui kelompok sosial, tetapi sikap berlawanan dengan pemerintah terlihat dari upaya mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2013-2018. Ditambah lagi dengan perspektif mereka yang menganggap bahwa tidak adanya Tindakan Pemprov sumut 2013-2018 dalam mengurangi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin.

Respon setuju pada variabel evaluasi ekonomi politik memiliki hubungan yang signifikan dengan tingginya *voters abstention* pada pertanyaan "Kondisi Ekonomi Sumatera Utara Lebih Baik pada Masa Pemprov Sumut 2013-2018".

²⁶ Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 8.

²⁷ Mancur Olson Jr. The Logic Of Collective Action, (Massachusetts: Harvard University Press), hal. 1-2.

Berikut tabel tabulasi silang yang menjelaskan signifikansi hubungan tersebut.

Tabel 1.3.
Tabulasi Silang antara Kondisi Ekonomi Pemprov Sumatera Utara lebih baik pada periode 2013-2018 dengan Ketidakpuasan Pemilih Terhadap Kinerja Pemprov Sumatera Utara 2013-2018

Kondisi Ekonomi Pemprov Sumatera Utara lebih baik pada periode 2013-2018		Ketidakpuasan Pemilih Terhadap Kinerja Pemprov Sumatera Utara 2013-2018		Total
		Tidak	Ya	
	Sangat Tidak Setuju	0.5%	0.5%	1.0%
	Tidak Setuju	21.6%	8.3%	29.9%
	Ragu-Ragu	20.1%	7.8%	27.9%
	Setuju	21.6%	19.6%	41.2%
Total		63.7%	36.3%	100.0%

Berdasarkan tabel silang tersebut, terdapat jumlah yang sama antara pemilih yang tidak puas dan puas terhadap kinerja Pemprov Sumatera Utara 2013-2018, dalam merespon pernyataan “Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara lebih baik pada periode Pemprov Sumatera Utara 2013-2018” yaitu 21,6 persen. Tetapi jika dibandingkan selisih antara pemilih yang puas dan tidak puas terhadap kinerja Pemprov Sumatera Utara 2013-2018,

responden tidak setuju memiliki selisih yang lebih tinggi yaitu 13,3 persen, sedangkan responden yang setuju memiliki selisih 2 persen. Padahal jumlah responden yang setuju merupakan responden yang tertinggi sebesar 41,2 persen. Jika disajikan dalam bentuk tabulasi silang 4.4. berikut penjelasannya.

Tabel 1.4. Uji Chi-Square antara Kondisi Ekonomi Pemprov Sumatera Utara lebih baik pada periode 2013-2018 dengan Ketidakpuasan Pemilih Terhadap Kinerja Pemprov Sumatera Utara 2013-2018

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.364 ^a	3	.039
Likelihood Ratio	8.341	3	.039
Linear-by-Linear Association	5.665	1	.017
N of Valid Cases	204		

Nilai signifikansi pada pernyataan “Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara lebih baik pada periode Pemprov Sumatera Utara 2013-2018” adalah sebesar 0,039. Artinya, terdapat signifikansi antara pernyataan “Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara lebih baik pada periode Pemprov Sumatera Utara 2013-2018” dengan kepuasan pemilih terhadap kinerja pemerintahan

Sumatera Utara periode 2013-2018. Karena nilai *chi-square* dibawah 0,05 persen. Artinya semakin pemilih abstain mempertimbangkan kondisi ekonomi kota medan pada masa Pemprov Sumatera Utara 2013-2018, semakin pemilih tidak puas terhadap kinerja pemprov sumut 2013-2018.

Respon pemilih yang tidak puas terhadap kinerja Pemprov Sumut 2013-2018 mewakili mayoritas pemilih yang tidak setuju jika kondisi ekonomi Sumatera Utara 2013-2018 lebih baik. Sedangkan pemilih yang setuju responnya terbagi dua antara pemilih yang puas dengan pemilih yang tidak puas terhadap kinerja pemprov sumut.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya kekuatan hubungan antara penilaian terhadap kondisi perekonomian provinsi Sumatera Utara dengan pemilih yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.

Pertanyaan ini tentunya tidak menunjukkan adanya kelemahan dari keterwakilan Pemprov Sumut 2013-2018 terhadap pemilihnya. Pada kasus ini pemilih abstain melihat bahwa kondisi ekonomi rumah tangga keluarganya baik-baik saja. Tetapi ketika pemilih

melihat keadaan di sekitarnya membuat pemilih abstain berpikir ulang untuk memberikan penilaian baik terhadap kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Utara 2013-2018. Hal ini masih berkaitan dengan penilaian mengenai gagalnya Pemprov Sumut 2013-2018 dalam mengatasi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Kesenjangan yang dirasakan langsung oleh pemilih abstain tersebut menjadi wujud ketidakpuasan pemilih abstain pemilih abstain terhadap kondisi perekonomiannya. Penilaian terhadap kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemilih untuk memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya. Pemilih lebih melihat adanya tanggung jawab pemerintah terhadap kondisi perekonomian Sumatera Utara 2013-2018 ketimbang kondisi ekonomi rumah tangga yang didasarkan pada subjektifitas pemilih pribadi.

Pengaruh Faktor Efikasi Politik terhadap tingginya jumlah Voters Abstention di Kota Medan Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018.

Hipotesis variabel efikasi politik berangkat dari proposisi Riker dan Ordeshook (1968) yang

menyatakan “pemilih memiliki efikasi politik atau pemahaman yang baik terhadap kondisi politik lingkungan pemilihnya, tetapi jika tidak memiliki efikasi politik yang baik, maka pemilih akan *abstain* atau menjadi apatis”. Penelitian ini mengarahkan asumsi pemilih bahwa mereka abstain karena mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi politik yang baik. Tetapi terdapat kondisi institusi politik yang ada dilingkungannya tidak sesuai dengan ekspektasi dari pemilih abstain tersebut. Dengan kata lain jika pemilih merasakan bahwa kondisi politik di lingkungan pemerintahannya kurang baik, maka pemilih tersebut tidak akan terlibat. Pada akhirnya hipotesis ini mengarahkan kepada abstainnya pemilih yang didasarkan pada kapabilitas politik pemilih abstain itu sendiri.

Variabel efikasi politik tidak memiliki hubungan sama sekali dengan tingginya *voters abstention* pemilih Kota Medan pada Pilkada Sumatera Utara 2018. Berikut tabel distribusi frekuensi yang menjelaskan mengenai kekuatan hubungan antara keterlibatan pemilih dalam program yang diselenggarakan oleh Pemprov Sumut 2013-2018 dengan

ketidakpuasan pemilih terhadap kinerja Pemprov Sumut 2013-2018.

Tabel 1.5. Tabulasi silang antara Pemilih terlibat dalam Program yang diselenggarakan Pemprov Sumut 2013-2018 dengan Ketidak puasan Pemilih Terhadap Kinerja Pemprov Sumatera Utara 2013-2018.

Pemilih terlibat dalam Program yang diselenggarakan Pemprov Sumut 2013-2018		Ketidak puasan Pemilih Terhadap Kinerja Pemprov Sumatera Utara 2013-2018		Total
		Tidak	Ya	
	Sangat Tidak Setuju	0.0%	0.5%	0.5%
	Tidak Setuju	33.8%	18.6%	52.5 %
	Ragu-Ragu	18.1%	6.9%	25.0 %
	Setuju	11.8%	10.3%	22.1 %
Total		63.7%	36.3%	100.0 %

Tabulasi silang menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih, khususnya pemilih yang tidak puas terhadap kinerja Pemprov Sumut 2013-2018 menyatakan tidak setuju terhadap keterlibatannya dalam program Pemprov Sumut 2013-2018, sebesar 33,8 persen. Pemilih yang puas juga cenderung menjawab tidak setuju dengan jumlah responden sebesar 18,6 persen. Analisa *chi-square* terhadap relasi keterlibatan pemilih dalam

program pemerintah dengan tingkat kepuasan pemilih dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1.6. Uji Chi-Square antara Pemilih terlibat dalam Program yang diselenggarakan Pemprov Sumut 2013-2018 dengan Ketidakpuasan Pemilih Terhadap Kinerja Pemprov Sumatera Utara 2013-2018

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.604 ^a	3	.133
Likelihood Ratio	5.882	3	.117
Linear-by-Linear Association	.563	1	.453
N of Valid Cases	204		

Hasil analisa *chi-square* pada tabel menunjukkan angka 0,133. Analisa *chi-square* menunjukkan angka yang tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Berdasarkan angka signifikansi yang dihasilkan, tidak ada hubungan yang signifikan antara keterlibatan pemilih dalam program yang diselenggarakan Pemprov Sumut 2013-2018 dengan ketidakpuasan pemilih abstain terhadap kinerja Pemprov Sumut 2013-2018. Meskipun pada pertanyaan ini kecenderungan respon yang dihasilkan adalah tidak setuju, pemilih yang semakin meragukan kemampuannya untuk

terlibat dalam Program yang dilaksanakan oleh Pemprov Sumut 2013-2018, maka pemilih semakin tidak puas terhadap kinerja Pemprov Sumut 2013-2018.

Bagi pemilih abstain keterlibatan dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan salah satu wujud kemampuan mereka dalam berpartisipasi politik. Dengan terlibat dari program yang dilaksanakan oleh Pemprov Sumut 2013-2018, pemilih merasa kemampuan berpartisipasinya lebih berarti. Ketika pemilih menjatuhkan pilihannya pada seorang kandidat, pemilih akan melihat tawaran program yang digunakan oleh kandidat untuk menarik suara pemilih. Disisi lain, pemilih akan melihat keuntungan yang didapatkan dari program yang ditawarkan oleh kandidat. Ketika kandidat tersebut terpilih, pemilih memastikan bahwa program yang ditawarkan tersebut direalisasikan oleh kandidat setelah terpilih. Jika program tidak terealisasikan, maka pemilih tidak akan mendapatkan keuntungan didalamnya. Akibat yang ditimbulkan, adalah pemilih berpotensi untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Pada kasus ini pemilih tidak melihat adanya realisasi kampanye dari

Pemprov Sumut 2013-2018 ketika menjabat. Sehingga pemilih abstain merasa tidak puas dengan kinerja pemprov sumut 2013-2018 karena tidak merasakan adanya program yang diterjemahkan berdasarkan kampanye yang dilakukan oleh Pemprov Sumut 2013-2018 ketika berkampanye menjadi kandidat pada pemilihan umum kepala daerah 2013 sebelumnya.

Penilaian terhadap program Pemprov Sumut 2013-2018 dan keterlibatan pemilih abstain dalam program yang dilaksanakan Pemprov Sumut 2013-2018 menunjukkan bahwa rangasngan kemampuan pemilih dalam berpartisipasi politik ada melalui program yang dilaksanakan oleh Pemprov Sumut 2013-2018 sebagai bentuk janji kampanyenya. Beberapa pertanyaan seperti kepemilikan akses terhadap Pemprov Sumut, pengetahuan pemilih abstain terhadap isu politik yang berkembang di Pemprov Sumut 2013 - 2018, respon pemilih terhadap pentingnya pemilu tidak menunjukkan adanya signifikansi terhadap ketidakpuasan pemilih abstain terhadap kinerja Pemprov Sumut 2013-2018. Pemilih *abstain* cenderung menyadari kemampuannya dalam berpartisipasi politik melalui

program yang diberikan oleh pemerintah. Pemilih merasa bahwa kepemilikan akses terhadap pejabat publik dan kebanggaan menggunakan hak pilih dalam pilkada belum menunjukkan kemampuan mereka dalam berpartisipasi politik. Keterlibatan pemilih abstain dan program yang dilaksanakan oleh pemprov sumut, mewakili dua definisi efikasi politik internal dan eksternal yang digagas oleh lane. Walaupun pada akhirnya kekuatan hubungan antara program dengan ketidakpuasan pemilih abstain tidak mencerminkan terbuktinya hipotesis efikasi politik.

Hubungan Faktor Biaya yang Ditanggung Pemilih untuk pergi ke TPS terhadap tingginya jumlah *Voters Abstention* di Kota Medan Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018.

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh biaya yang ditanggung pemilih untuk pergi ke TPS terhadap tingginya jumlah voters abstention di Kota Medan pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara 2018. Hipotesis ini berangkat dari proposisi "Pemilih mempertimbangkan biaya yang berkaitan dengan teknis memilih untuk menggunakan hak pilihnya". Teknis kepemiluan menjadi hambatan tersendiri bagi

pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Memastikan diri untuk terdaftar di TPS, jauhnya jarak TPS dari tempat tinggal dan waktu memilih dinilai sebagai penyebab pemilih mengkalkulasi biaya yang dikeluarkan untuk pergi ke TPS menggunakan hak pilih. Blais (2000) menilai biaya ini tidak tinggi, tetapi biaya untuk pergi ke TPS memicu rendahnya persentase partisipasi memilih. Pada sub-bab ini akan dijelaskan kekuatan hubungan yang timbul diantara pertanyaan yang berkaitan dengan variabel biaya yang ditanggung pemilih untuk pergi ke TPS dengan ketidakpuasan pemilih terhadap kinerja Pemprov Sumut 2013-2018. Penyelenggaraan pemilu tidak hanya mengacu pada KPU saja sebagai penyelenggara, tetapi ada peran pemprov Sumut 2013-2018 yang mengalokasikan dana untuk pemilu khususnya pilkada serentak.

Pertanyaan variabel biaya yang ditanggung pemilih untuk pergi ke TPS melebihi nilai signifikansi adalah “Ketidaksesuaian alamat pemilih dengan TPS tempat Pemilih mencoblos, mempersulit pemilih”. Berikut Tabel tabulasi silang yang memberikan penjelasan nilai signifikansi ketidaksesuaian alamat TPS terhadap tempat tinggal pemilih

dengan ketidakpuasan pemilih abstain terhadap kinerja Pemprov Sumut 2013-2018.

Tabel.1.7. Tabulasi silang antara Ketidaksesuaian alamat pemilih dengan TPS tempat Pemilih mencoblos, mempersulit pemilih dengan Ketidakpuasan Pemilih Terhadap Kinerja Pemprov Sumatera Utara 2013-2018

Ketidaksesuaian alamat pemilih dengan TPS tempat Pemilih mencoblos, mempersulit pemilih		Ketidakpuasan Pemilih Terhadap Kinerja Pemprov Sumatera Utara 2013-2018		Total
		Tidak	Ya	
Tidak Setuju		17.6%	9.3%	27.0%
Ragu-Ragu		19.1%	16.2%	35.3%
Setuju		25.0%	10.8%	35.8%
Sangat Setuju		2.0%	0.0%	2.0%
Total		63.7%	36.3%	100.0%

Sebagian besar pemilih, khususnya pemilih yang puas terhadap kinerja Pemprov Sumut 2013-2018 menyatakan setuju, jika ketidaksesuaian antara alamat pemilih dengan TPS tempat pemilih melakukan pemungutan suara dengan jumlah responden 25 persen. Bagi pemilih yang puas, jawaban ragu-ragu menjadi jawaban yang cukup tinggi dengan

16,2 persen. Terdapat 2 persen responden yang tidak puas menyatakan sangat setuju jika ketidaksesuaian alamat pemilih dengan TPS mempersulit mereka untuk menggunakan hak pilih. Analisa *chi-square* terhadap ketidaksesuaian alamat pemilih dengan tempat mencoblos pemilih sebagai pertimbangan pemilih untuk abstain dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.8. Uji Chi-Square Ketidakesuaian alamat pemilih dengan TPS tempat Pemilih mencoblos, mempersulit pemilih dengan Ketidak puasan Pemilih Terhadap Kinerja Pemprov Sumatera Utara 2013-2018.

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.384 ^a	3	.094
Likelihood Ratio	7.660	3	.054
Linear-by-Linear Association	1.266	1	.261
N of Valid Cases	204		

Nilai signifikansi yang terdapat pada tabel tersebut sebesar 0,094. Nilai tersebut melebihi nilai signifikansi yaitu 0,05. Angka signifikansi tersebut hampir mendekati angka yang signifikan. Dengan kata lain semakin lokasi TPS tidak sesuai dengan rumah pemilih, semakin pemilih tidak puas terhadap kinerja Pemprov

Sumut 2013-2018. KPUD Kota Medan menggabungkan beberapa TPS menjadi satu TPS. Pada pembahasan tabulasi silang ketidaksesuaian alamat pemilih dengan tempat pemilih mencoblos, menunjukkan bahwa hal tersebut menjadi hambatan. Penggabungan TPS menghadirkan potensi untuk merubah lokasi TPS pemilih sebelumnya menjadi lokasi yang berbeda pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2013-2018.

Penggabungan TPS ini menghadirkan biaya bagi pemilih itu sendiri. Terdapat salah satu pemilih dalam penelitian Polgov (2018) yang mengakui bahwa harus menaiki alat transportasi umum ketika pergi ke TPS. Padahal pada pemilihan sebelumnya pemilih tersebut tidak perlu menggunakan transportasi umum atau mampu dijangkau karena dekat dari rumahnya. Kesulitan-kesulitan yang hadir dari Program KPUD kota Medan yang membuat mereka tidak puas dengan kinerja Pemprov Sumut 2013-2018.

Pemilihan yang seharusnya dapat mempermudah mereka pada akhirnya menjadi mempersulit pemilih abstain itu sendiri. Penggabungan TPS menghadirkan kerugian bagi pemilih itu sendiri karena ketika harus pergi ke TPS

mengeluarkan ongkos transportasi.

Penggabungan TPS memiliki dampak langsung pada pemilih, yaitu berbedanya alamat TPS dengan tempat tinggal pemilih. Hal ini berimplikasi bahwa pemilih melakukan kalkulasi terhadap biaya yang dikeluarkan jika pemilih memaksakan untuk pergi ke TPS. Blais (2000), Moon (1992), dan Sanders (1980) sepakat bahwa biaya pemilih memperhatikan dampak-dampak yang dihasilkan dari teknis kepemiluan sebagai potensi dari biaya pemilih itu sendiri. Dari keseluruhan pertanyaan, hanya ketidaksesuaian terhadap TPS dengan alamat tinggal pemilih yang dianggap memiliki dampak yang langsung terhadap pemilih. Pada akhirnya, sulit untuk membuktikan bahwa variabel biaya yang ditanggung pemilih untuk pergi ke TPS mempengaruhi tingginya *voters abstention*.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji regresi logistic. Penggunaan uji regresi logistic dilatarbelakangi oleh alasan variabel yang bersifat parsial atau tidak menimbulkan multikolinieritas. Uji regresi logistic yang digunakan lebih

tepatnya adalah uji regresi logistik biner, dimana variabel Y memiliki data nominal dengan dua opsi jawaban. Berdasarkan ketiga variabel tersebut, berikut tabel pengujian Hipotesis regresi logistik.

Tabel 1.9. Uji Regresi Logistik

	B	S. E.	Wald	D f	Si g.	Exp(B)
Evaluasi Ekonomi Politik	.836	.253	10.933	1	.001	2.307
Efikasi Politik	-.172	.218	.618	1	.432	.842
Biaya Pemilih	-.333	.249	1.791	1	.181	.716
	-1.663	.981	2.872	1	.090	.190

Variabel Penilaian terhadap kondisi ekonomi politik memiliki nilai signifikansi 0,01, sehingga membuat variabel penilaian terhadap kondisi ekonomi politik berpengaruh pada tingkat *voters abstention*. Berdasarkan uji korelasi *chi-square* yang dijelaskan melalui hasil tabulasi silang, terdapat dua indikator yang memiliki nilai signifikansi. Indikator pertama adalah Penilaian pemilih abstain terhadap kondisi ekonomi politik pada masa pemerintahan PemProv Sumut 2013-2018 yang diturunkan kedalam pernyataan "Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

lebih baik pada masa jabatan Pemprov Sumatera Utara 2013-2018". Nilai signifikansinya 0,039. Indikator kedua "penilaian pemilih berdasarkan kemampuan Pemprov Sumatera Utara Periode 2013-2018 dalam mengurangi kesenjangan antara pihak yang kaya dan miskin diturunkan melalui pernyataan "Pemerintah Sumatera Utara mampu mengatasi kesenjangan antara yang Kaya dan Miskin". Nilai signifikansi pada pengujian indikator tersebut, sebesar 0,028.

Penggunaan terhadap perspektif teoritis Fiorina (1982) dan Gellneau (2011) menunjukkan relevansi dengan tingginya *voters abstention*. Sisi egosentris pemilih berdasarkan perspektif. Fiorina (1974), mampu membantu menjelaskan melalui penelitian ini, bahwa pemilih mempertimbangkan kondisi ekonomi sebagai faktor yang dekat dengan situasi pemilih. Gelneau (2011) juga mendukung pandangan Fiorina (1974), informasi mengenai kondisi perekonomian menjadi pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya.

Penilaian terhadap kondisi ekonomi politik sebagai pertimbangan untuk menggunakan hak pilih, membentuk perspektif jika

kandidat pertahana atau pemerintahan sebelumnya dipilih maka perolehan suara menjadi hadiah bagi pertahana. Jika pemilih kecewa dengan kinerja pertahana atau pemerintah sebelumnya, maka pemilih akan menjatuhkan pilihannya pada lawan pertahana dan tidak memilih pertahana. Pengujian indikator penilaian kondisi perekonomian Sumatera Utara 2013-2018 terhadap *voters abstentions* membantu menjelaskan bahwa pemilih memberikan hukuman pada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018 dengan tidak menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa teori pilihan rasional tidak hanya menjelaskan mengenai kalkulasi terhadap pemilihan kandidat saja. Teori *Retrospective voting* mampu menjelaskan penyebab pemilih abstain dengan mengkaji penilaian pemilih terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya.

Variabel efikasi politik menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat *voters abstention*. Nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0.133. Pengujian *chi-square* pada seluruh indikator tidak mencapai angka 0,05. Pengujian efikasi politik berangkat dari asumsi Lane (1959) efikasi

politik terdiri dari dua dimensi. Pertama adalah efikasi politik internal yang berasal dari kemampuan pemilih yang tidak hanya sebagai penonton dalam aspek politik, tetapi terlibat didalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan uji korelasi, terdapat pertanyaan yang memiliki hubungan yang hampir berkaitan. Penilaian pemilih berdasarkan kemampuannya dalam mengikuti program yang dilaksanakan Pemprov Sumut 2013-2018 dengan kemampuan pemprov sumut dalam melaksanakan program menunjukkan sedikit ada korelasi antara variabel efikasi politik dengan tingginya jumlah *voters abstention* di Kota Medan. Korelasi tersebut dijelaskan oleh Lestari (2018) yang menyatakan bahwa pemilih mengawal janji-janji kampanye yang direalisasikan melalui program kerja yang dilaksanakan Ketika terpilih. Tetapi pemilih berpandangan bahwa mereka sudah bosan dengan janji-janji kandidat dan mementingkan pekerjaannya sendiri. Selain itu terdapat pula responden lain yang

mengharapkan pemimpin yang berpihak pada rakyatnya. Salah satunya adalah melalui realisasi program yang didasarkan dari janji kampanyenya untuk memperbaiki taraf hidupnya.²⁸

Respon yang diharapkan sesuai dengan hipotesis variabel penilaian berdasarkan efikasi politik adalah pemilih yang memiliki efikasi politik yang tinggi, sehingga pemilih mengetahui kesalahan dalam pemerintahnya dan tidak menggunakan hak pilihnya. Tetapi pada kenyataannya pemilih terlihat seperti entitas yang apatis, dan dimanfaatkan demi kepentingan pemenangan pemilu oleh kandidat yang sedang berkontestasi. Mujani (2003), pernah mencoba meneliti mengenai efikasi politik pemilih dan hasilnya 3 dari 10 warga negara yang berpendapat bahwa mereka memiliki kapabilitas dalam mempengaruhi keputusan pemerintah dan menilai bahwa pemerintah peduli terhadap aspirasi mereka.²⁹ Dengan kata lain, Mujani tidak melihat adanya efikasi politik yang tinggi pada warga negara Indonesia.

²⁸ Aprilia Anggi Lestari, Studi Etnografi Tentang Pelayanan & Kinerja KPU Kota Medan Pada Pilgub Tahun 2018, Universitas Sumatera Utara.

²⁹ Saiful Mujani, Muslim Demokrat : Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik Indonesia Pasca Orde Baru, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal. 198.

Perspektif Mujani tersebut masih relevan dan mampu mendukung tidak terbuktinya hipotesis variabel penilaian pemilih abstain berdasarkan efikasi politiknya.

Pengujian hipotesis variabel penilaian pemilih berdasarkan biaya yang ditanggung pemilih untuk pergi ke TPS menunjukkan hasil yang tidak terbukti. Nilai signifikansi yang diperoleh pada pengujian variabel biaya memilih terhadap tingginya *voters abstention* adalah sebesar 0,181. Terdapat salah satu indikator yang hampir signifikan dalam pengujian chi-square yaitu ketidaksesuaian alamat pemilih dengan lokasi TPS. Nilai signifikansinya sebesar 0,094 mendekati angka 0,05. Temuan dalam indikator tersebut menilai bahwa lokasi TPS yang tidak sesuai dengan lokasi tempat tinggal pemilih mempersulit pemilih itu sendiri. Teori Sanders (1980) yang menjelaskan mengenai kondisi geografis pemilih mempengaruhi biaya memilih jika pemilih tinggal lama di suatu tempat, dapat dikatakan relevan pada kasus ini. KPUD kota Medan mengadakan penggabungan TPS pada Pilkada Gubernur Sumatera

Utara 2018. Penggabungan TPS ini membuat pemilih harus menggunakan alat transportasi. Bahkan masing-masing anggota keluarga dapat memilih di TPS yang berbeda-beda. Walaupun pada akhirnya temuan ini tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

Mancur Olson (1965) menyatakan bahwa biaya memilih tidak ada sama sekali. Hasil pemilihan umum merupakan barang publik.³⁰ Kandidat manapun yang menang, hasilnya adalah milik publik itu sendiri. Baik menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan hak pilih, sama saja untuk setiap pemilih.³¹ Secara umum perspektif Olson (1965) dapat menyepakati temuan-temuan pada penelitian ini. Tetapi penelitian Blais dkk (2019), menunjukkan bahwa biaya memilih bagi para pengguna hak pilih sangat rendah.³² Hal ini dikarenakan biaya memilih tergantung pada kalkulasi subjektif pemilih itu sendiri. Tetapi biaya memilih ini penting, karena mampu mengurangi tingkat partisipasi memilih. Biaya memilih bukanlah hal yang menahan orang

³⁰ Saiful Mujani, William Liddle, Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat*, (Bandung: Mizan), hlm. 39.

³¹ Mancur Olson Jr. *The Logic Of Collective Action*, (Massachusetts: Harvard University Press), hal. 23-30.

³² Andre Blais. dkk, *What is the cost of voting?*, *Electoral Studies*, Vol. 59, hal. 145-157.

untuk keluar dari rumah agar menggunakan hak pilihnya.

Untuk membantu menjelaskan variabel biaya memilih yang tidak memiliki hubungan yang signifikan, peneliti menggunakan penelitian skripsi Lestari (2018) yang menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang diperoleh KPUD Kota Medan yang menimbulkan biaya bagi pemilih. Lestari (2018) menjelaskan faktor penghambat KPUD Kota Medan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.³³ Faktor internal terdiri atas, kurang maksimalnya koordinasi antara lembaga yang terkait seperti pemerintah daerah dengan penyediaan sarana dan anggaran. Terdapat kekurangan logistik pemilu, sosialisasi tatap muka yang kurang melibatkan penyelenggara di tingkat bawah, dan DP4 yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kurang akurat. Pada akhirnya kinerja pemerintah daerah diasumsikan berkorelasi dengan lancarnya pelaksanaan pemilu oleh penyelenggara pemilu.

KESIMPULAN

Hasil pengujian hipotesis pada variabel penilaian terhadap kinerja

ekonomi politik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 mempengaruhi pemilih Kota Medan menjadi pemilih abstain. Nilai signifikansi 0,001 menunjukkan bahwa variabel penilaian terhadap kondisi ekonomi politik mempengaruhi seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Indikator penentu berpengaruhnya variabel tersebut adalah signifikannya pengujian terhadap penilaian pemilih berdasarkan kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada masa Pemprov Sumatera Utara 2013-2018. Pada kasus ini pemilih abstain diajak untuk melihat kondisi ekonomi diluar kondisi ekonomi rumah tangganya sehingga timbul penilaian yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih yang tidak puas cenderung untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Nilai signifikansi pada indikator ini sebesar 0,039.

Indikator kedua yang membuat faktor penilaian terhadap kondisi ekonomi politik berpengaruh terhadap pemilih abstain adalah penilaian pemilih terhadap kemampuan Pemprov Sumut

³³ Aprilia Anggi Lestari, Studi Etnografi Tentang Pelayanan & Kinerja KPU Kota Medan

Pada Pilgub Tahun 2018, Universitas Sumatera Utara.

periode 2013-2018 dalam mengatasi kesenjangan yang kaya dan yang miskin. Pemilih abstain menilai bahwa mereka merasa tidak diuntungkan dari kesenjangan ekonomi yang gagal diselesaikan oleh Pemprov Sumut 2013-2018. Nilai signifikansi pada indikator ini sebesar 0,28 persen.

Variabel penilaian berdasarkan efikasi politik pemilih kota Medan tidak berpengaruh pada keputusan pemilih untuk tidak hadir ke TPS. Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan angka 0,432 dan lebih besar dari 0,05. Salah satu indikator yang mendekati signifikan dalam variabel efikasi politik adalah kemampuan pemilih dalam memahami situasi politik melalui program yang dilaksanakan Pemprov Sumut 2013-2018. Dengan kata lain kemampuan pemilih abstain berpartisipasi dalam program pemilih adalah upaya untuk mengawal janji kampanye kandidat ketika terpilih. Pada akhirnya pemilih abstain tidak melihat adanya realisasi dari program yang dijanjikan oleh Pemprov Sumut 2013-2018.

Variabel biaya memilih tidak berpengaruh terhadap keputusan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Hasil uji dari variabel biaya memilih lebih baik

ketimbang variabel efikasi politik dengan angka 0,181. Indikator ketidaksesuaian alamat TPS dengan tempat tinggal pemilih mempersulit mereka menunjukkan nilai yang hampir signifikan sebesar 0,094. Pemilih Merasa harus mengeluarkan biaya ketika pergi Ke TPS. Ada kerugian yang dirasakan oleh pemilih abstain didalamnya

IMPLIKASI TEORITIS

Tidak adanya petahana pada kasus ini membuat perspektif *retrospective voting* diarahkan pada pertimbangan kinerja pemerintah periode sebelumnya. Jika pemilih melihat kinerja pemerintahan sebelumnya menguntungkan pemilih, maka pemilih akan menggunakan hak pilih, Jika petahana merugikan pemilih, maka pemilih tidak akan menggunakan hak pilihnya.

Penelitian ini membuktikan bahwa teori *retrospective voting* mampu menjelaskan alasan warga negara tidak menggunakan hak pilihnya. Pemilih kota Medan pada Pilgubsu 2018 menunjukkan bahwa beberapa responden pemilih abstain mempertimbangkan kinerja pemerintahan Provinsi Sumatera Utara 2018 di bidang perekonomian. Bidang perekonomian dipilih karena

dekat dengan kehidupan sehari-hari pemilih.

Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.

DAFTAR RUJUKAN

- Blais, A. (2000). *To Vote Or To Not To Vote: The Merits and Limits Of Rational Choice Theory* Pittsburg: University Of Pittsburg Press
- Budiman, A. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. (2018). Literature Review. In C. John, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 5th Editions* (pp. 62-89). London: SAGE.
- De Vaus, D. (2001). *Surveys In Social Research*, . London: Routledge.
- Dorussen, H., & Taylor, M. (2002). *Economic Voting*. London: Routledge.
- Downs, A. (1957). *An Economic theory of Democracy*, . New York: Harper
- Evans, J. (2004). *Voters & Voting an Introduction*. California: Sage.
- Gabriel, O. (1986). *Politische Kultur, Postmaterialismus und Materialismus in der Bundesrepublik*. Jerman: Opladen.
- Huntington, S., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik di Negara*
- Lipset, S. M. (2013). *Political Man*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mujani, S. (2007). *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mujani, S., Liddle, W., & Ambhardi, K. (2012). *Kuasa Rakyat*. Bandung: Mizan.
- Mujani, S., Liddle, W., & Ambhardi, K. (2019). *Kaum Demokrat Kritis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Neuman, W. L., *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7th Ed., Allyn and Bacon, Boston.
- Olson, M. (1965). *The Logic Of Collective Action*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Roth, D. (2008). *Studi Pemilu Empiris: Sumber, teori-teori, Instrumen, dan Metode*, hal. 49. Jakarta: FSNT.
- Vetter, A. (1997). *Political Efficacy Reliabilitat und Validitat*, hal 20. Wiesbaden: Deutscher Universitots-Verlag GmbH.
- Wright, J. (1981). *The Handbook of Political Behavior Vol.4*. New York: Springer.

Jurnal

- Balch, G. (1974). Multiple Indicators in Survey Research: The Concept Senses of Political Efficacy. *Political Methodology*, 1-43.
- Blais, A., & Achen, C. (2019). Civic Duty and Voter Turnout. *Political Behavior*, 473-497.
- Blais, A., Daoust, J.-F., Dassonneville, R., & Péloquin-Skulski, G. (2019). What is the cost of voting? *Electoral Studies*, 145-157.
- Clarke, H., & Acock, A. (1989). National Elections and Political Attitudes: The Case of Political Efficacy. *British Journal of Political Science*, 551-562.
- Dyck, J., & Lascher, E. (2009). Direct Democracy and Political Efficacy Reconsidered. *Political Behavior*, 401-427.
- Feitosa, F. (2020). Theoretically, yes, but also empirically? How the corruption-turnout link is marginally explained by civic duty to vote. *Electoral Studies*.
- Finkel, S. (1989). Reciprocal Effects of Participation on Political Efficacy. *American Journal of Political Science*, hal. 891-913.
- Fiorina, M. (1978). Economic Retrospective Voting in America National Elections: A Micro Analysis. *American Journal of Political Science*, 426-443.
- Gellneau, F. (2013). Electoral Accountability In The Developing World. *Electoral Studies*, 418-424.
- Julian, & Ardiantin. (2018). Korelasi Identifikasi Apatisme Politik dengan Kebijakan Publik Kota Medan. *Jurnal PIR*, 29-52.
- Moon, D. (1992). The Determinants of Turnout in President Election An Integrative Model Accounting for Information. *Political Behaviour*, 123-140.
- Riker, W., & Ordeshook, P. (1968). A theory of The Calculus of Voting. *The American Political Science Review*, 25-42.
- Sigelman, L., & Berry, W. (1982). *Cost and the Calculus of Voting*. Springer.
- Sigelman, L., & Goldfarb, R. (2010). DOES 'CIVIC DUTY' 'SOLVE' THE RATIONAL CHOICE VOTER TURNOUT PUZZLE? *Journal of Theoretical Politics*, 275-300.

Website

- Komisi Pemilihan Umum. (2020, April 24). KPU. Retrieved from Penetapan Hasil Pilkada Provinsi Sumatera Utara: https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/rekap/t1/sumatera_utara
- KPU Kota Medan. (2020, April 24). KPU Kota Medan. Diakses dari

Menakar Kadar Partisipasi Pemilih di Kota Medan Menyongsong Pilkada Serentak 2020: <https://kpud-medankota.go.id/menakar-kadar-partisipasi-pemilih-di-kota-medan-menyongsong-pilkada-serentak-2020/>

Wiwoho, B. (2017, November 22). *Survei TII: Medan Kota Terkorup 2017*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171122193232-12-257460/survei-tii-medan-kota-terkorup-2017>

Laporan Penelitian

Polgov. (2018). *Voters Abstention Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Ketidakhadiran Pemilih dalam Pilkada 2018 di Kota Medan*. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Aprilia Anggi Lestari. (2018). *Studi Etnografi Tentang Pelayanan & Kinerja KPU Kota Medan Pada Pilgub Tahun 2018*, Medan: Universitas Sumatera Utara.